

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Selain pembangunan ekonomi, fokus lain dari pembangunan yaitu mengembangkan serta menciptakan sumberdaya manusia yang unggul di segala aspek kehidupan. UUD 1945 dalam pasal 27 tentang hak kesamaan antara perempuan dan laki-laki telah dijamin oleh hukum. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia menjamin bahwa setiap individu baik itu laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak dan keadilan yang sama.

Pembangunan merupakan bagian dari proses perubahan yang melingkupi seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, teknologi, kelembagaan dan budaya, yang dilakukan melalui perencanaan yang terarah. Dengan demikian memiliki cakupan di segala sendi kehidupan suatu negara untuk kemajuan. Kemajuan suatu negara dilakukan melalui proses yang terencana dan terarah dengan proses yang bertahap. Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang memiliki dampak yang lebih baik dari pada sebelumnya dengan dilakukan secara terencana.

Transformasi di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan kebijakan serta strategi agar terwujud sesuai dengan yang diinginkan. Di bidang ekonomi contohnya adanya kenaikan dan penambahan produksi yang pesat untuk meningkatkan pendapatan nasional. Transformasi dibidang sosial misalnya, terjadi peningkatan kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat dalam mengakses fasilitas publik baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih. Sedangkan transformasi

dibidang budaya, bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme yang berbarengan dengan perubahan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.

Riady dan Supriady (2005:3:22), menyatakan ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu:

1. Menampung dan merumuskan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan agar pembangunan dapat lebih diperincikan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.
2. Pemerintah melalui kementrian ataupun dinas-dinas tertentu menjadi pendamping ataupun menjadi lembaga yang menghimpun aspirasi-aspirasi dari masyarakat.
3. Membentuk sebuah forum musyawarah dengan masyarakat secara langsung supaya masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk dapat membicarakan cost dan benefit dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Menentukan tokoh masyarakat ataupun perwakilan dari masyarakat untuk ikut dalam proses selanjutnya dalam pembangunan.
5. Melakukan proses perencanaan program pembangunan, rencana baiaya pembangunan, dan rencana pelaksanaan pembangunan dilakukan beberapa kali dengan melibatkan instansi-instansi tertentu dan perwakilan dari masyarakat.
6. Didapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang telah setuju bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

7. Pelaksanaan program pembangunan, dengan pemantauan serta pengawasan ketat oleh masyarakat yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat tersebut.

Program pembangunan yang terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia, memiliki tujuan untuk memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya. Akan tetapi strategi pembangunan ini seringkali tidak memberikan hasil yang memuaskan dikarenakan negara terlalu memberikan perhatian lebih pada aspek pembangunan fisik dan kurang perhatian pada aspek yang lain seperti aspek pembangunan manusia. Hal tersebut memunculkan paradigma baru dalam strategi pembangunan yang dikenal dengan nama *people centered development*, dimana manusia dijadikan tujuan utama dari pembangunan. Manusia ditempatkan sebagai subjek dan objek pembangunan dengan menekankan pentingnya pemberdayaan manusia agar dapat mengaktualisasikan potensi masing-masing individu.

Umumnya di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia kebudayaan masyarakat lebih banyak didominasi oleh laki-laki sehingga melahirkan budaya yang disebut patriarki, dimana laki-laki memiliki dominasi yang kuat seperti pemegang kekuasaan utama dan mendominasi peran kepemimpinan dalam politik sehingga perempuan tidak setara dengan laki-laki. Masyarakat memiliki pandangan bahwa perempuan merupakan pribadi yang memiliki ciri-ciri lemah lembut, emosional, dan sebagainya. Sedangkan laki-laki memiliki ciri yang kuat, kasar, dan rasional. Dengan adanya pandangan seperti itu,

timbul perbedaan status dan peranan antara laki-laki dan perempuan yang disebut gender.

Sebagian orang telah memahami istilah dari gender dengan benar, akan tetapi masih banyak juga orang yang tidak memahami istilah gender dengan benar dan memerlukan pemahaman lagi. Ketidapahaman ini bukan hanya terjadi dikalangan masyarakat awam, tidak sedikit masyarakat yang dengan tingkat pendidikan yang tinggi masih belum paham dengan benar mengenai gender. Masyarakat hanya paham bahwa gender sering digunakan untuk menyebut kaum wanita serta sering dikaitkan dengan istilah seks dan kodrat. Istilah ini membuat masyarakat menganggap seks dan kodrat bagian dari gender, misalnya masih banyak masyarakat yang mengatakan pekerjaan rumah tangga merupakan tugas wanita dan kodratnya, padahal anggapan seperti itu benar-benar keliru.

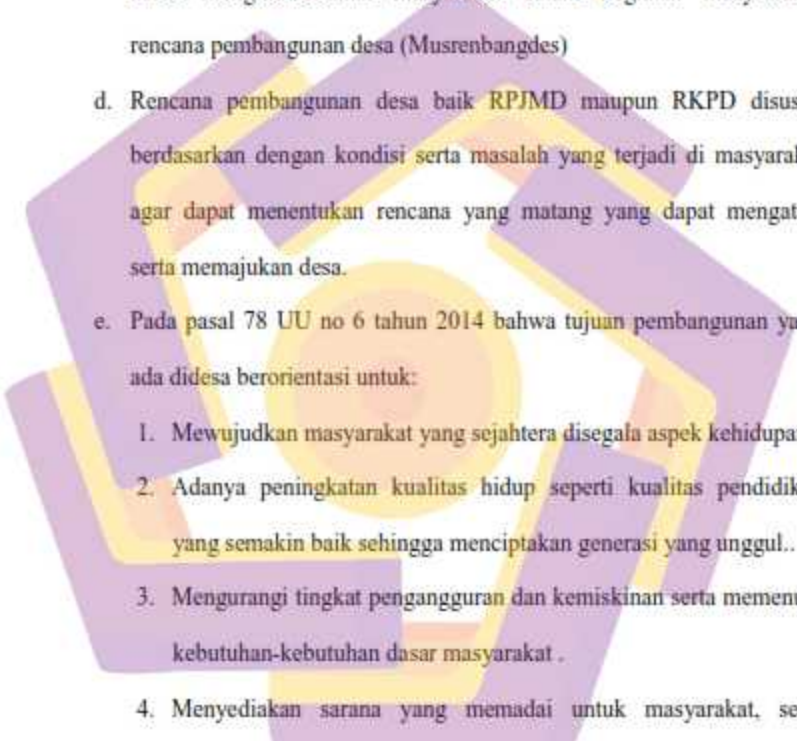
Manusia memiliki kedudukan sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan serta peranan yang sama terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menikmati dampak dari pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Dilihat dari kondisi normatifnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam berbagai bidang, akan tetapi jika dilihat dari kondisi objektifnya perempuan benar-benar tertinggal di berbagai bidang pembangunan.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk menarik serta mendorong kaum perempuan untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dan masyarakat yang dimana kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan mengevaluasi kebijakan. Pengarusutamaan gender berfungsi agar dapat menciptakan mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diinstruksikan melalui INPRES no 9 tahun 2000.

Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa posisi desa merupakan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hak khusus untuk dapat menyelenggarakan urusan-urusan pribadi seperti administrasi, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. Berlakunya undang-undang no 6 tahun 2014 ini berpengaruh terhadap perubahan-perubahan dalam desa seperti:

- a. Desa maupun kelurahan memiliki kewajiban untuk membuat rencana pembangunan seperti:
 1. Rencana pembangunan yang menjadi pedoman kerja serta fokus pemerintah desa selama jangka waktu 6 tahun seperti RPJMD.
 2. Kemudian menyusun rencana kerja pemerintah yang memuat segala rencana kegiatan selama 1 tahun dan masih memiliki keterkaitan dengan RPJMD.

- 
- b. Segala rencana yang disusun oleh desa baik RPJMD maupun RKPD harus berdasarkan dan berpedoman dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- c. Mulai dari penyusunan rencana pembangunan desa, penyelenggara desa harus mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes)
- d. Rencana pembangunan desa baik RPJMD maupun RKPD disusun berdasarkan dengan kondisi serta masalah yang terjadi di masyarakat agar dapat menentukan rencana yang matang yang dapat mengatasi serta memajukan desa.
- e. Pada pasal 78 UU no 6 tahun 2014 bahwa tujuan pembangunan yang ada di desa berorientasi untuk:
1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera disegala aspek kehidupan.
 2. Adanya peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan yang semakin baik sehingga menciptakan generasi yang unggul..
 3. Mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat .
 4. Menyediakan sarana yang memadai untuk masyarakat, serta memberikan pelayanan yang mudah, nyaman, dan cepat.
 5. Memberikan pelatihan-pelatihan ekonomi seperti pengembang kelompok dagang maupun yang lain-nya yang sesuai dengan keunikan yang ada di desa tersebut.

6. Memanfaatkan dan mengelola dengan baik hasil alam yang ada di desa tersebut agar dapat memberikan serta menghadirkan lahan-lahan pekerjaan baru bagi masyarakat yang dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.

Program pemerintah seperti musrembang dan PKK merupakan program yang memerlukan partisipasi masyarakat khususnya kaum perempuan. Keberhasilan dari program tersebut bergantung pada tingkat partisipasi dari perempuan, semakin tinggi tingkat partisipasi perempuan maka akan semakin tinggi juga tingkat keberhasilan dari program tersebut. Oleh karena itu, partisipasi dari kaum perempuan benar-benar dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan program tersebut dan berdampak pada pembangunan yang ada di desa.

Naru merupakan desa administratif yang letak posisinya begitu strategis di kecamatan sape, kabupaten Bima, NTB. Beberapa kantor administratif kecamatan sape terletak di wilayah desa Naru seperti kantor camat Sape, kantor UPT Dikbud, perpustakaan daerah, dan kantor KUA. Pasar menjadi salah satu komponen penting dalam penggerak roda ekonomi suatu wilayah, di desa Naru terdapat pasar yang berbagi wilayah (pasar) dengan desa Naru Barat. Serta terdapat dua bank yaitu bank BNI dan bank BIAS yang menjadi tempat bagi masyarakat sape lebih-lebih masyarakat desa Naru untuk menyimpan ataupun memperoleh modal dengan sistem pinjaman dari bank. Puskesmas yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan yang mengakomodasi seluruh pelayanan kesehatan masyarakat kecamatan sape berada di wilayah desa Naru..

Pada tahun 2019 jumlah penduduk di desa Naru sebanyak 3.799 jiwa dengan 1.912 jiwa laki-laki dan 1.887 jiwa perempuan. Jumlah perbandingan perempuan dan laki-laki di desa tidak terlalu jauh jumlahnya. Penduduk desa Naru merupakan penduduk dengan keberagaman kepercayaan terbanyak di kecamatan sape. Dari jumlah penduduk desa Naru 3.799 jiwa, ada 3.740 jiwa yang beragama Islam, 13 jiwa Kristen Katolik, 8 jiwa Protestan, dan 3 jiwa Hindu.

Sebagian penduduk desa Naru bekerja di sektor pertanian yang dapat ditarik kesimpulan rata-rata penduduk desa Naru bekerja sebagai petani, dengan rincian 1.217 jiwa petani, 406 jiwa sebagai buruh tani, dan 12 jiwa sebagai peternak. Penduduk desa Naru tidak hanya bekerja di sektor pertanian, disektor non pertanian seperti kontruksi, perdagangan, transportasi.

Penduduk desa Naru tidak hanya bekerja di sektor pertanian maupun sektor non pertanian. Di sektor pemerintahan seperti PNS, ABRI/TNI/POLRI, Guru, Pensiunan, serta pegawai Bank/Pegadaian.

Puskesmas yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan yang mengakomodasi seluruh pelayanan kesehatan masyarakat kecamatan sape berada di wilayah administrasi desa Naru. Terdapat fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainya seperti praktek dokter dan 2 apotek. Jumlah penduduk desa Naru yang bekerja di sektor kesehatan tergolong banyak. Terciptanya SDM yang berkualitas berasal dari kualitas pendidikan yang baik, di desa Naru sarana pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SMA ada di wilayah administrasinya.

Dari rincian data singkat diatas yang menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat di Desa Naru, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan

penelitian terkait dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Dengan kondisi wilayah dan penduduk yang selangkah lebih unggul dari wilayah desa lainnya, apakah tingkat partisipasi perempuan memiliki andil yang sangat penting untuk pembangunan desa yang berdampak pada kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan pada bidang kesehatan dan sosial khususnya di program posyandu dan PKK serta bentuk-bentuk partisipasi perempuan di desa Nuru tahun 2020.
2. Faktor penghambat dan pendukung partisipasi perempuan dalam program pembangunan dibidang kesehatan dan sosial desa Nuru.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam program pembangunan dibidang kesehatan dan sosial di desa Nuru dan bentuk-bentuk partisipasi.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan di desa Nuru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat:

- a. Untuk membantu pengembangan ilmu pengetahuan terkait partisipasi perempuan di bidang Ilmu Pemerintahan.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan partisipasi perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan.

b. Bagi pemerintah desa Naru

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan pertimbangan untuk pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

c. Bagi masyarakat desa Naru

Diharapkan menjadi informasi dasar mengenai penting partisipasi khususnya perempuan dalam pembangunan.

1.5 Sistematika Bab

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, menjelaskan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini mulai dari pembeda sampai persamaan. Kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti mengemukakan tentang metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Agar tersistematis bab metode penelitian ini meliputi:

- a. Desain Penelitian
- b. Objek penelitian
- c. Subjek penelitian

- d. Jenis dan sumber data
- e. Teknik pengumpulan data, dan
- f. Teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisis yang ditemukan dari permasalahan penelitian yang relevan dan sesuai dengan teori yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dari masalah yang diangkat dalam penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis. Sedangkan saran memuat tentang solusi dan jalan keluar untuk mengatasi masalah baik untuk objek maupun dan subjek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini terdiri dari pustaka yang dijadikan acuan dalam penelitian seperti buku, penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal, dan sebagainya.

LAMPIRAN

Bagian ini terdiri dari gambar, kolom, instrumen penelitian untuk melengkapi laporan penelitian.